

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya adalah di bidang perekonomian. Pemerintah Indonesia mempunyai peran penting untuk memajukan Negeranya. Salah satu kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari pembangunan nasional yang berjalan secara berkesinambungan. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih luas lagi pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Irawan, 2002:5).

Meskipun realisasi pembangunan telah dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat namun tidak berarti terjadi secara demokratis, dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya baik itu antara pusat maupun daerah.

Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (perkapita) penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kemakmuran, mekanisme pasar dll. Dampak dari kesenjangan tersebut menimbulkan

tuntutan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia.

Oleh karena itu untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan otonomi daerah atau sistem desentralisasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, transparansi dan bertanggung jawab. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban, daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber dana untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya, dengan cara memaksimalkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mendapatkan sumber pendapatan daerahnya sendiri, sehingga tujuan dari otonomi daerah tentang kemandirian daerah mampu tercapai. Salah satu sumber dana untuk kepentingan pemerintahan melalui sektor pendapatan asli daerah. Seperti yang diatur dalam undang-undang no 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah, yang bertujuan untuk keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Pajak yang dimaksud adalah pajak daerah yang didalamnya memuat Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan, Penerang jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan harga seperti pajak hotel sebesar 10 % yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga melakukan pemungutan pajak sebagai pendapatan untuk daerah disamping bantuan dana dari pusat. seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan banyaknya jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah diharapkan dapat meratakan perekonomian di Kabupaten Gunung Kidul.

Penelitian ini berfokus pada salah satu jenis pajak daerah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Pajak Hotel. Satu-satunya kabupaten terluas yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak potensi

wisata berupa pantai, gua, pegunungan karst dan hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai tempat yang banyak untuk berwisata Gunungkidul semakin menarik bagi para investor untuk menanamkan dananya dalam usaha perhotelan.

Jumlah hotel terus bertambah tahun 2016 sebanyak 122 dengan jumlah kamar 1053 sampai tahun 2017 sebanyak 170 dengan jumlah kamar 1503 (sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul). Setiap tahun pemerintah telah menetapkan dalam APBD mengenai anggaran dan realisasi masing-masing pajak daerah berdasarkan data tahun sebelumnya. Diharapkan setiap tahunnya sektor pajak dapat memenuhi target yang ditetapkan bahkan lebih. Pajak Hotel yang dipungut pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentu saja mengalami kenaikan dan penurunan baik dari segi anggaran maupun target yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rofian (2014) menemukan bahwa secara keseluruhan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 hingga 2013 dikategorikan tidak efektif dimana tingkat efektivitas pajak hotel kurang dari 60 %, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2017) menemukan bahwa efisiensi pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi dan penurunan tiap tahunnya, efisiensi pajak hotel tertinggi berasal dari tahun 2011 sebesar 0,21% dan efisiensi terendah berasal dari tahun 2013 sebesar 0,61%. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan efisiensi Pajak hotel terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul tahun 2014-2018 ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan menganalisis nilai efektivitas dan efisiensi Pajak Hotel.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul tahun 2014-2018
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul tahun 2014-2018

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul

Pemerintah dapat melihat potensi dari sektor pajak daerah dan menggali pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Serta menjadi rujukan informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan.

2. Untuk pengembangan ilmu ekonomi perpajakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah bahan referensi kepustakaan yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul.

3. Bagi Peneliti

Dengan mengembangkan teori yang didapat mengenai Pajak Hotel, sehingga penulis mengetahui bagaimana cara menghitung efektivitas dan efisiensi dari Pajak Hotel

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka Dan Teori

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan tinjauan teori para ahli sebagai dasar acuan dalam menganalisa masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian tempat dan waktu penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV : Data dan Analisis Data

Bab ini berisi tentang deskripsi data analisis data dan pembahasan

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan Penutup. Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Betty. (2012) *Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. Media Ekonomi dan Manajemen,26. <http://jurnal.untagsmg.ac.id>
- Halim,Abdul (2004) *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi revisi. YKPN. Yogyakarta.
- Halim,Abdul (2016) *Perpajakan*. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Irawan & Suparmoko, 2002, *ekonomika pembangunan*, BPFE, Yogyakarta
- Melinda, (2017) *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Di Kabupaten Bantul Tahun 2013- 2015*. Yogyakarta: *Skripsi pada Sanata Dharma*. Yogyakarta
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan*. Edisi terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mahsun, (2013) *Akutansi Sektor Publik*. Edisi ketiga.BPFE. Yogyakarta.
- Nordiawan,Deddy.2006. *Akutansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Oktarina, (2010) *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah kota Yogyakarta.Skripsi pada Universitas Sanata Dharma*.Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 Tentang Pajak Daerah
- Widhiati (2008) *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Skripsi pada Universitas Sanata Dharma*.Yogyakarta
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).

Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014–2016). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).

Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. *Wahana*, 20(1), 13-23.